1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Inflasi daerah (m-to-m)

- **Juli 2026:** deflasi -0,30 persen. Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau memberi andil deflasi terbesar.
- **Agustus 2026:** inflasi 0,15 persen, dengan andil dari kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau.
- **September 2026:** inflasi 0,37 persen. Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau menjadi penyumbang utama (andil 0,31 persen), diikuti Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, serta Pakaian dan Alas Kaki.

2. Harga kebutuhan pokok dan barang penting

- Sebagian besar dari 24 komoditas harganya **stabil** sepanjang triwulan (misalnya beras premium Rp14.500/kg, beras medium Rp13.000/kg, gula Rp19.000, daging sapi Rp140.000/kg, telur Rp30.000).
- **Naik:** cabai rawit (Rp35.000 di akhir Juli menjadi Rp90.000 pada September), udang (Rp75.000 menjadi Rp80.000), minyak goreng kemasan (Rp20.000 menjadi Rp22.000 sejak minggu III September).
- **Turun:** bawang putih (Rp40.000 menjadi Rp35.000), bawang merah (Rp50.000 menjadi Rp40.000 pada Juli), daging ayam broiler (Rp33.000 menjadi Rp30.000).
- **Berfluktuasi:** tomat dan cabai merah besar.

3. Barang lainnya dan jasa

- Tekanan inflasi juga datang dari bensin, bahan bakar rumah tangga, jasa pemeliharaan/service, pendidikan sekolah dasar, telepon seluler, mobil, dan sepeda motor, dengan andil kecil (0,01 sampai 0,03 persen).
- Emas perhiasan justru menahan inflasi (-0,06 pada Juli dan -0,02 pada September).

4. Risiko ke depan

- **Volatilitas harga pangan** yang tinggi, terutama cabai, telur ayam ras, daging ayam ras, ikan, tomat, dan bawang merah.
- **Tekanan di akhir triwulan:** cabai rawit (0,07), daging ayam ras (0,06), dan telur ayam ras (0,04) menjadi penyumbang terbesar pada September.
- **Harga energi** yang dapat berdampak pada biaya transportasi, distribusi, produksi, dan pemasaran.
- **Ketergantungan pasokan dari luar daerah** karena produksi lokal belum memenuhi seluruh kebutuhan.
- **Pengendalian yang masih reaktif**, sehingga laporan menekankan langkah antisipatif (pre-emptive) berbasis pemantauan harga, stok, musim, dan pasokan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. **Fluktuasi harga komoditas pangan strategis.** Ikan dan hasil perikanan (bandeng/bolu, selar/tude, teri, layang/benggol, cakalang/sisik, kembung/gembung) beberapa kali menyumbang kenaikan harga, sehingga berpengaruh cukup besar

terhadap inflasi Kota Palopo.

2. **Kenaikan harga hortikultura.** Pada September 2026, cabai rawit menjadi penyumbang terbesar (andil 0,07 persen), diikuti daging ayam ras (0,06) dan telur ayam ras (0,04). Ini menunjukkan tekanan pada komoditas dengan volatilitas harga relatif tinggi.
3. **Perubahan harga daging dan produk peternakan.** Daging ayam ras dan telur ayam ras menyumbang inflasi pada Agustus dan September. Laporan menilai ini perlu perhatian karena tingkat konsumsinya relatif tinggi.
4. **Perubahan harga energi dan bahan bakar.** Bensin dan bahan bakar rumah tangga memberi andil pada periode tertentu, dan dapat berdampak lanjutan pada biaya transportasi, distribusi, produksi, dan pemasaran.
5. **Kenaikan harga jasa dan kebutuhan nonpangan.** Jasa pemeliharaan/service, kendaraan bermotor, pendidikan sekolah dasar, dan telepon seluler ikut memberi andil, sehingga tekanan inflasi tidak hanya dari pangan.
6. **Penurunan harga yang menahan laju inflasi.** Juli: tomat (-0,24), bawang merah (-0,12), telur ayam ras dan emas perhiasan (masing-masing -0,06). Agustus: tomat (-0,16). September: ikan bandeng/bolu (-0,03) dan emas perhiasan (-0,02).
7. **Volatilitas harga pangan antarbulan yang tinggi.** Ini disebut sebagai karakteristik utama inflasi Triwulan III: komoditas yang naik pada satu bulan dapat turun pada bulan berikutnya. Karena itu pengendalian perlu responsif dan berbasis pemantauan harga berkala, terutama pada komoditas dengan bobot konsumsi dan fluktuasi harga tinggi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. **Pemantauan harga dan stok** komoditas pangan strategis secara berkala, terutama yang fluktuatif (cabai rawit, tomat, bawang merah, beras, telur ayam ras, daging ayam ras, dan berbagai jenis ikan), sebagai dasar intervensi cepat.
2. **Intensifikasi operasi pasar/pasar murah** untuk menjaga keterjangkauan harga dan daya beli. Sejak September 2026, frekuensinya minimal **1 kali seminggu**.
3. **Penguatan ketersediaan dan distribusi melalui Mini Distribution Center (MDC)** yang menyediakan beras, minyak goreng, gula, dan tepung dengan harga terjangkau.
4. **Menjaga kelancaran distribusi** dari sentra produksi ke pasar melalui koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha, agar tidak terjadi kelangkaan atau kenaikan harga akibat gangguan rantai pasok.
5. **Gerakan Menanam Cabai bagi ASN** berdasarkan Surat Edaran Nomor 500/1/EKON. Setiap ASN wajib menanam minimal 2 pohon cabai dan melaporkan progresnya kepada Bagian Perekonomian.
6. **Penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)** kepada keluarga kurang mampu dan kelompok yang membutuhkan.
7. **Penguatan koordinasi dan pemantauan harga oleh TPID**, disertai komunikasi publik tentang harga dan ketersediaan pangan untuk mencegah kepanikan dan pembelian berlebihan.
8. **Penguatan komunikasi dan informasi harga pangan** untuk menjaga ekspektasi masyarakat dan mencegah panic buying, serta menjadi bahan koordinasi penentuan langkah pengendalian.
9. **Kerja sama dengan daerah pemasok** untuk menjamin kontinuitas pasokan komoditas yang belum sepenuhnya terpenuhi produksi lokal.

Kegiatan lapangan yang telah dilaksanakan

Pengawasan LPG 3 Kg: 1-3 Juli (distribusi di Kec. Wara Utara dan Bara) dan 28 Juli (pengecer).
- **Pengawasan dan sosialisasi SE Wali Kota** tentang pembatasan BBM di SPBU (31 Juli dan 3 Agustus).
- **Pemantauan harga dan stok** pada distributor (3-5 Agustus).
- **Operasi pasar/pasar murah:** 21 Juli (Hari Koperasi Nasional ke-79, Lagota), 31 Agustus dan 1 September (Lagota), 16, 23, dan 30 September (Pasar Mungkajang), serta 22 September (HUT TNI ke-81, Lapangan Gaspa).
- **Rapat pelaksanaan operasi pasar/pasar murah** (2 September).

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. **Operasi pasar/pasar murah semakin diintensifkan.** Frekuensi minimal sekali seminggu sejak September 2026 menunjukkan respons terhadap perkembangan harga pangan dan diharapkan membantu menahan kenaikan harga di tingkat konsumen.
2. **MDC mendukung ketersediaan pangan pokok.** Penyediaan beras, minyak goreng, gula, dan tepung memberi alternatif akses pangan terjangkau. MDC perlu terus dioptimalkan agar berfungsi berkelanjutan sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga.
3. **Gerakan menanam cabai ASN memperkuat pengendalian dari sisi produksi.** Langkah ini positif untuk meningkatkan ketersediaan cabai di tingkat rumah tangga dan membangun partisipasi. Ke depan diperlukan **monitoring keberlanjutan tanaman dan tingkat kepatuhan** agar dampaknya lebih optimal.
4. **Penyaluran beras CPPD memberi manfaat ganda.** Memenuhi kebutuhan pangan keluarga kurang mampu, mengurangi tekanan daya beli, serta menjaga keseimbangan pasokan dan stabilitas harga beras.
5. **Pemantauan harga dan koordinasi antar-OPD perlu terus diperkuat.** Komoditas penyumbang inflasi dapat berubah cepat dari bulan ke bulan, sehingga pemantauan harga dan stok harus konsisten agar respons lebih cepat.
6. **Kerja sama antardaerah menjadi langkah strategis jangka menengah.** Penjajakan dengan daerah sentra produksi/pemasok perlu terus dikembangkan untuk memperkuat kepastian pasokan, terutama komoditas yang produksi lokalnya belum mencukupi.
7. **Pengendalian masih perlu diarahkan pada komoditas pangan bergejolak.** Perikanan, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, dan hortikultura masih memengaruhi inflasi. Pengendalian tidak boleh hanya reaktif setelah harga naik, tetapi **antisipatif** berdasarkan perkembangan harga, stok, musim, dan kondisi pasokan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. **Mempertahankan dan mengintensifkan operasi pasar/pasar murah**, terutama saat harga komoditas pangan strategis naik. Pelaksanaan minimal sekali seminggu sejak September 2026 perlu dievaluasi berkala dan diarahkan pada komoditas yang mengalami tekanan harga.
2. **Mengoptimalkan fungsi Mini Distribution Center (MDC).** Penyediaan beras, minyak goreng, gula, dan tepung perlu dijaga kontinuitasnya, disertai pemantauan stok dan harga.
3. **Memperkuat gerakan menanam cabai** di lingkungan Pemerintah Kota dan masyarakat. Pelaksanaan SE Nomor 500/1/EKON (ASN menanam minimal 2 pohon cabai) perlu dimonitor dan dievaluasi, lalu dikembangkan melalui pemanfaatan lahan
   -

pekarangan, perkantoran, sekolah, dan fasilitas publik.

4. **Memperkuat penyaluran dan pengelolaan CPPD** sebagai instrumen stabilisasi pangan dan perlindungan daya beli, dengan penyaluran beras yang tepat sasaran, terutama saat ada tekanan harga atau gangguan pasokan.
5. **Meningkatkan pemantauan harga, stok, dan distribusi** komoditas strategis yang volatil dan berulang menyumbang inflasi (cabai, telur ayam ras, daging ayam ras, perikanan, tomat, bawang merah, dan pangan pokok lain) sebagai dasar intervensi cepat dan tepat.
6. **Memperkuat kerja sama antardaerah** dengan daerah surplus atau berpotensi memproduksi pangan strategis, agar Kota Palopo punya alternatif sumber pasokan saat terjadi gangguan produksi atau distribusi.
7. **Mengembangkan produksi pangan lokal dan diversifikasi sumber pasokan**, terutama komoditas berkontribusi besar terhadap inflasi, melalui sinergi perangkat daerah, kelompok tani, kelompok nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat, sehingga ketergantungan pasokan luar daerah berkurang bertahap.
8. **Memperkuat kelancaran distribusi dan efisiensi rantai pasok** lewat koordinasi dengan distributor, pedagang, pelaku usaha, dan daerah pemasok, untuk mencegah keterlambatan pasokan dan kenaikan harga akibat biaya distribusi atau gangguan rantai pasok.
9. **Meningkatkan koordinasi dan respons cepat TPID.** Setiap indikasi kenaikan harga komoditas strategis segera dibahas dalam TPID untuk menentukan intervensi, sehingga pengendalian bersifat **pre-emptive**, bukan hanya setelah kenaikan signifikan.
10. **Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program.** Evaluasi tidak hanya melihat terlaksananya kegiatan, tetapi juga dampaknya terhadap harga, ketersediaan pasokan, distribusi, dan daya beli, sebagai dasar penyempurnaan kebijakan periode berikutnya.